

## **BAB II**

### **LITERATUR REVIEW**

#### **2.1. Pendahuluan**

Hubungan antara tingkat keberagamaan dan voting menjadi kajian (Green & Gerber, 2015) Studi di Amerika partisipasi dalam voting memiliki korelasi yang kuat dengan religiusitas. Alasan penting mengapa terdapat korelasi keberagamaan memiliki korelasi dengan perilaku elektoral; pertama, partisipasi dalam organisasi keagamaan akan membangun ketrampilan kewargaan dan lebih lanjut meningkatkan partisipasi politik dan kedua, aktivitas dalam organisasi keagamaan meningkatkan penyerapan informasi politik dibandingkan dengan yang tidak aktif (Green & Gerber, 2015). Studi ini lebih memfokuskan perilaku elektoral warga Muhammadiyah terutama dalam pemilihan kepala daerah. Sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dimulai pada tahun 2004, elit lokal banyak yang memasuki politik elektoral, seperti elit bisnis, elit partai politik, birokrat lokal, kularga kaya dan elit organisasi keagamaan (Hadiz, 2011; Hidayat, 2007; Savirani, 2004).

Dalam kajian perilaku elektoral, terdapat enam model yaitu: the resource model, the mobilization model, the socialization model, the rational choice model, the psychological model, and the political–institutional model (Smets & Van Ham, 2013). Model sumberdaya meneliti variabel variabel yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi, suku bangsa, tempat tinggal, pendapatan dan lain sebagainya (Smets & Van Ham, 2013). Model mobilisasi meneliti perilaku pemilih yang disebabkan oleh organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial. Model sosialisasi melihat perilaku memilih

dipengaruhi oleh sosialisasi oleh agen-agen seperti keluarga, teman pergaulan dan media. Model rasional melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh pilihan masa lalu (past turnout) (Cutts, Darby, Boone, & Brewis, 2009), pemilih pemula (new voter), kecenderungan untuk memilih (propensity to vote), Biaya memilih (costs of voting), kepedulian pada calon (Cares who wins), keuntungan personal (personal benefits and civic duty), dan evaluasi pada kondisi ekonomi, parpol dan calon (Evaluation economy, parties and candidates) (Rosenstone, 1982). Model psikologi meneliti variabel-variabel identifikasi pada partai politik, pengetahuan politik dan kepentingan politik knowledge (Denny & Doyle, 2008; Rubinson, Diette, Song, Brower, & Krishnan, 2004), kepuasan warganegara pada sistem politik di negara-negara yang memiliki sistem politik yang sudah mapan akan menurunkan tingkat partisipasi pada pemilihan umum dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi juga (Ezrow & Xezonakis, 2016). Model politik kelembagaan meneliti regulasi pemilihan umum, aturan tentang daerah pemilihan, jumlah calon dan kewajiban memilih yang mempengaruhi perilaku memilih (Franklin, 2004). (Cancela & Geys, 2016) menemukan bahwa biaya kampanye, kedekatan waktu pemilihan dan persyaratan pemilih memiliki pengaruh pada tingkat partisipasi di tingkat nasional, namun komposisi pendudukan dan sistem pemilihan memiliki pengaruh pada partisipasi ditingkat lokal.

Kajian tentang sikap dan perilaku politik anggota organisasi keagamaan telah lama dikaji oleh para ilmuwan politik. Pertama hasil penelitian Alfian peneliti senior Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) telah menyatakan bahwa pada prinsipnya ada tiga hal penting mengenai perilaku politik Muhammadiyah. Pertama sikap anti penjajahan dengan segala bentuknya. Kedua yakni perilaku umumnya dalam gerakan nasionalis Indonesia. Ketiga, sepakterjangnya Muhammadiyah yang aktif dan independen dalam masyarakat Islam

Indonesia dengan perbedaannya yang menonjol diantara satu daerah dengan daerah yang lain. Suatu bukti sejarah telah diangkat oleh Alfian bahwa perilaku politik Muhammadiyah Minangkabau itu dinilai lebih radikal dibanding Muhammadiyah Jawa (Alfian, 1989).

Perilaku politik Muhammadiyah yang secara signifikan menjadi catatan sejarah di era orde lama adalah gesekan ideologi antara tokoh Muhammadiyah dan yang sepaham pemikirannya dengan Muhammadiyah dengan tokoh-tokoh lain yang berseberangan dan berhadap-hadapan. Kepemimpinan periode Orde Lama berada pada kisaran waktu 20 (dua puluh tahun). Kepemimpinan Muhammadiyah yang bersamaan dengan orde lama itu memiliki 4 (empat) kepemimpinan yang masing-masing terdiri Ki Bagus Hadikusumo (1942 – 1953); Buya AR Sutan Mansur (1953 – 1959); HM Yunus Anis (1959 – 1962); (h). KH Ahmad Badawi (1962 – 1968) (Abror, HM 2017).

M. Sirajuddin Syamsuddin telah melakukan penelitian dan kajian tentang sikap politik Muhammadiyah ketika berada pada zaman orde baru. Secara umum, sikap dan perilaku politik Islam di Indonesia terbelah menjadi 2 (dua) kelompok kepentingan, yakni Islam politik dan Islam non politik. Ketika masuk wilayah Muhammadiyah sebagai kelompok “politik”, menurut analisisnya, problem utama Muhammadiyah adalah terletak pada inkonsistensinya dalam memandang hubungan politik dan Islam, serta dalam merespon proses pembangunan politik. Pandangan demikian berpengaruh pada perilaku dan tindakan politiknya ketika organisasi ini berhadapan dengan kebijakan Negara dan kelompok lain. Akan tetapi, Sirajuddin menegaskan bahwa perilaku politik Muhammadiyah adalah politik alokatif. Jenis perilaku ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh sikap individu AR Fahrudin (Pak AR) yang dikenal sangat santun, bijak, tetapi tetap teguh memegang prinsip dan tidak goyah oleh berbagai tawaran dan iming-iming (Haris & Saidi, 1991).

Syaifullah menegaskan bahwa ada 3 (tiga) corak pemikiran dan perilaku politik Muhammadiyah ketika berhadapan dengan pihak penguasa atau rezim yang sedang memimpin dan berkuasa. Selain memiliki pemikiran dan perilaku politik yang menjadi prinsip dan pegangan hidupnya, perilaku politik para elite Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh irama dan tekanan politik dari penguasa/pemerintah. Tiga corak perilaku tersebut adalah Revivalisme, Modernisme, dan Sekularisme. Revivalisme diwakili oleh Ki Bagus Hadikusuma, Prof A. Kahar Muzakir, K.H. Mas Mansyur, dan Dr. Sukirman Wiryosandjoyo. Modernisme, secara pasti, corak ini diwakili oleh KH Ahmad Dahlan, namun pemikiran modernism tetap banyak pengikut baik dulu maupun sekarang. Corak ketiga adalah sekularisme. Corak perilaku politik Muhammadiyah model ini pertama kali diketengahkan oleh Haji Agus Salim yang pada Muktamar Muhammadiyah 1918 mengusulkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik (Haris & Saidi, 1991).

Haedar Nashir, telah melakukan penelitian dan kajian mengenai *Perilaku Politik Elite Muhammadiyah di Pekajangan*. Studi ini berkesimpulan bahwa ada 3 (tiga) pola perilaku politik elit Muhammadiyah. *Pertama* perilaku politik moderat akomodasionis. Pola ini ditandai oleh (1) partisipasi politik dalam pemilu memilih organisasi politik tertentu tanpa fanatisme yang berlebihan, dan (2) kesediaan untuk bekerjasama dan menjalin hubungan secara luwes dan rasional dengan pemerintah tanpa harus meleburkan diri. *Kedua* perilaku politik elit “idealis” yang cenderung mencita-citakan adanya system politik Islam, dan sangat menjaga jarak hubungan dengan pemerintah, kendati tidak disertai dengan sikap konfrontasi. *Ketiga*, perilaku politik elit pragmatis. Kelompok inilah yang menunjukkan kecenderungan meleburkan diri dari kepentingan politik dan birokrasi pemerintah. Dari tiga kelompok tersebut, kelompok pertama

berjumlah 87 %. sedang kelompok dua dan tiga masing-masing berjumlah 6,5 %. (Nashir, 1998).

Syarifuddin Jurdi dengan penelitian dan kajiannya mengenai Elite Muhammadiyah Dan Kekuasaan Politik (Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru) telah memberikan penafsiran dan gambaran bahwa kelompok elite Muhammadiyah Bima memiliki perilaku yang terkelompokkan dalam 4 (empat) corak artikulasi. Pertama, artikulasi yang bersifat radikal. Kelompok ini berjuang tanpa perhitungan yang matang dengan melihat realitas sosial politik yang masih cukup dominan. Kedua, artikulasi elite yang bersifat pragmatis, yaitu perilaku elite yang cenderung mengintegrasikan diri dalam struktur kekuasaan dan kepentingan pemerintah atau politik kekuasaan. Ketiga, artikulasi elite yang bersifat moderat akomodasional. Kelompok ini lebih menekankan pada kerja sama menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pemerintah secara proporsional dengan selalu bersikap sikris tanpa mengintegrasikan diri atau terkooptasi dengan kekuasaan pemerintah. Keempat, artikulasi elite yang bersifat transformative, yakni elite yang cenderung pada proses pemberdayaan umat dengan mentransformasikan nilai-nilai Islam. Elite dalam konteks ini mendasarkan usaha sosialnya pada peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran Islam selain memperhatikan fenomena sosial politik aktual. ((Jurdi, 2004)

Dalam kasus perilaku elektoral warga Muhammadiyah dalam pilkada menunjukkan perbedaan dengan perilaku di tingkat nasional (leveling) yang dipengaruhi oleh visi keagamaan berdasarkan konteks lokal (Nashir, 2017). Pada tingkat nasional, perilaku elit Muhammadiyah cenderung terpecah antara pengurus (Jung, 2014), namun pada tingkat lokal yang terjadi sebaliknya cenderung solid. Yang menjadi pertanyaan penting mengapa perilaku ini terjadi. Faktor faktor apakah yang mempengaruhinya? (Nashir, 2017)

mengkonfirmasi bahwa pengaruh kelompok dalam bentuk keanggotaan dan kepengurusan dalam Muhammadiyah (activism) mempengaruhi perilaku memilih kepala daerah di Yogyakarta. Artinya adanya insentif dari organisasi bagi aktivis Muhammadiyah untuk memilih. Insentif dari organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota merupakan perwujudan dari tindak kolektif (Ostrom, 1998).

## **2.2 Organisasi**

Organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu atau kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991). Pada umumnya pengertian organisasi selalu menunjuk pada pengelompokan dan pengaturan aktifitas manusia secara sadar dan terencana dalam ikhtiarnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selznick (1984:25-35) mendefinisikan organisasi sebagai “pengaturan orang untuk memfasilitasi pencapaian beberapa tujuan yang telah disepakati melalui pengalokasian fungsi dan tanggung jawab” (Ibrahim, I.2018).

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa organisasi-organisasi dibentuk oleh manusia. Tujuannya untuk melaksanakan atau mencapai hal-hal tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan secara individual. Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi di dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik secara individu. Disamping itu dapat dikatakan lagi bahwa organisasi-organisasi dapat membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Iapun merupakan sumber penting aneka macam karier di dalam masyarakat (Winardi, 2003).

Manusia pada dasarnya tidak dapat sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, dia akan membentuk suatu kelompok yang kemudian disebut organisasi, apapun bentuk kelompok itu. Manusia adalah pendukung utama setiap organisasi. Perilaku manusia yang berada dalam suatu kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku organisasi. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu kerangkaan hubungan yang berstruktur di dalamnya dan berisi wewenang, tanggungjawab dan pembagian tugas untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Organisasi adalah bentuk suatu system yang di dalamnya mempunyai struktur yang berbeda antara satu organisasi dengan yang lainnya (Mulyadi & Rivai, 2009).

### 2.2.1 Dasar Organisasi Dalam Islam.

Dalam kitab Al-Mu'jamul Washit 1 :126 disebutkan  
الجماعة لغة : العدد الكثير من الناس ؛ وقيل : الطائفة من الناس يجمعها غرض واحد  
*Al-Jamaah menurut bahasa adalah sekumpulan manusia; Disebutkan pula: Sekelompok manusia yang memiliki satu tujuan.*

انه لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا اماراة الا بالطاعة – ر الدرمي  
*Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan imarah, dan tidak ada imarah kecuali dengan keta'atan. R. Ad-Darimy 1 : 79.*

### Perintah berorganisasi

Dalam Al-Qur'an, ayat 104 surat Al-Imron:

وَأَتَىٰكَ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah ada suatu umat dari kamu-yang menjadi ikutan umum-yang menyeru manusia kepada kebajikan (yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat), yang menyuruh makruf-baik wajib*

maupun *sunnah*-dan mencegah mungkar-haram dan makruh. Dan jamaah itulah yang mendapat kemenangan.a.

Ayat tersebut oleh Ibnu Mundzir dimaknai sebagai perintah berorganisasi.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ خَيْرِ النَّاسِ،  
فَقَالَ: أَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَائُهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (ابو داود, المراعي 3:4)

Rosulullah SAW ditanya tentang sebaik-baiknya manusia, maka sabdanya: Mereka yang memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran (H.R. Abu Daud, Tafsier Al-Maroghi 4 : 3)

### **Larangan Memisahkan diri dari Organisasi**

من راعى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا  
فمات الامات ميتة جاهلية

Barangsiapa yang mendapatkan dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak sukai, maka hendaklah bersabar. Sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari Al-Jama'ah sejengkal saja, lantas ia mati, maka ia mati Jahiliyah. (HR. Al-Bukhari 4: 222 dari Ibnu Abas ra)

ان الله لا يجمع امتي على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ الى النار  
Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku dalam kesesatan, pertolongan Allah diberikan kepada al-Jama'ah, Barangsiapa yang menyendiri akan menyendiri ke neraka. (HR. At-Tirmidzi dari Ibnu Umar ra)

من مات بغير امام مات ميتة جاهلية – ر احمد

Barangsiapa yang mati dengan tidak memiliki imam, maka matinya seperti mati zaman jahiliyyah ( HR. Ahmad )

### **Perintah Mengangkat Pemimpin**

لا يحل لثلاثة يكونون بغلاة من الارض الا امروا عليهم اقدم – ر احمد عن ابن مسعود  
Tidak halal bagi tiga orang yang berada di tengah sahara, kecuali harus diangkat seorang dari mereka sebagai pemimpin (HR. Ahmad dari Ibnu Mas'ud ra).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Ayat tersebut mewajibkan amar makruf nahi munkar. Tugas ini adalah tugas agama yang suci; suatu pokok yang penting dari agama (Ash-Shiddieqy, 2002). Kata umat oleh TM Hasbi dimaknai sebagai jamaah yang menjadi ikutan umum menuju dunia akhirat. Dalam kata “umat” terselip makna-makna yang cukup dalam. Umat mengandung arti gerak dinamis, arah, waktu, jalan yang jelas, serta gaya dan cara hidup. Untuk menuju pada suatu arah, harus jelas jalannya, serta harus bergerak maju dengan gaya dan cara tertentu. Ali Syariati dalam bukunya *Al-Ummah wa Al-Imamah* menyebutkan keistimewaan kata ini dibandingkan kata semacam *nation* atau *qobilah* (suku). Pakar ini mendefinisikan kata umat-dalam konteks sosiologis-sebagai”himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis dibawah kepemimpinan bersama” (Shihab, 1996).

Penegasan kalimat yang menyebut “himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah, bahu membahu, dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama’ sangat tepat dialamatkan untuk menyebut organisasi Muhammadiyah. Meskipun secara lebih lengkap, penyebutan itu masih memerlukan penjelasan sesuai apa yang menjadi jati diri Muhammadiyah. Istilah jati diri itu dinamakan Kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakekat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah itu sendiri tidak lain merupakan jawaban dari empat pertanyaan di bawah ini.

1. Apakah Muhammadiyah itu?
2. Apa dasar dan amal usaha muhammadiyah?

3. Apa pedoman amal usaha dan perjuangan muhammadiyah?
4. Apa sifat Muhammadiyah?

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud dan Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. ditujukan kepada dua hal yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang yang pertama atau perseorangan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kepada yang telah Islam bersifat Tajdid (Pembaruan). Artinya mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni.
2. Kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip dalam muqadimah anggaran dasarnya, yaitu :

1. Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah SWT.
2. Hidup manusia harus bermanfaat.
3. Mematuhi ajaran-ajaran agama islam.
4. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat.
5. Ittiba' kepada langkah perjuangan langkah nabi Muhammad SAW.
6. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah. Dengan memperhatikan dasar prinsip diatas, maka Muhammadiyah berpedoman. "Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segala bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah SWT". Artinya, setiap usaha dan aktivitas dalam Muhammadiyah perlu

didasarkan pada niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian niat itu dikuatkan dengan merujuk kepada ajaran Allah agar setiap usaha yang dilakukan mendapatkan ridho Allah SWT.

Selain Muhammadiyah itu memiliki pengertian yang jelas, dasar amal usaha yang jelas, pedoman amal usaha yang juga jelas, Muhammadiyah juga mempunyai sifat-sifat yang jelas yaitu;

1. Beramal dan Berjuang Untuk Perdamaian dan Kesejahteraan.
2. Memperbanyak Kawan dari Mengamalkan Ukhuwah Islamiyah
3. Lapang Dada, Luas Pandangan Dengan Memegang Teguh Ajaran Islam
4. Bersifat Keagamaan Dan Kemasyarakatan
5. Mengindahkan, segala Hukum, Undang-undang Serta dan Falsafah Negara Yang Sah
6. Amar Maruf Nahi Munkar Dalam Segala Lapangan Serta Menjadi Contoh Teladan Yang Baik
7. Aktif Dalam Perkembangan Masyarakat Dengan Maksud islah dan Pembangunan Sesuai Dengan Ajaran Islam
8. Kerjasama Dengan Golongan Lain Mana Pun, Dalam Usaha Menyiarkan Dan Mengamalkan Ajaran Islam Serta Membela Kepentinganannya
9. Membantu Pemerintah Serta Kerjasama Dengan Golongan Lain Dalam Memelihara Negara dan Membangunnya, Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur Yang Diridhai
10. Bersifat Adil Serta Korektif Ke Dalam dan Keluar, Dengan Bijaksana.

### **2.2.2 Indikator Dasar Organisasi Dalam Politik**

Dalam penelitian ini yang dimaksud indikator dasar organisasi dalam konsep politik adalah berupa sejumlah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang organisasi Muhammadiyah yang ada pada diri setiap Pimpinan Muhammadiyah. Pengetahuan dan

pemahaman mendasar terkait Muhammadiyah itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian organisasi dan kemampuan menuliskannya
2. Identitas organisasi
3. Perintah dan hukum berorganisasi
4. Kepentingan, fungsi, dan manfaat berorganisasi
5. Bukti penting, fungsi, dan manfaatnya berorganisasi
6. Kemampuan memahami penting, fungsi dan manfaat berorganisasi
7. Kemampuan menilai dan membuktikan ada pentingnya, fungsi, dan manfaat berorganisasi
8. Kemampuan membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain.

### 2.3 Agama

Agama dalam berbagai pandangan. Tidak mudah mendefinisikan agama, apalagi di dunia ini kita menemukan kenyataan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang terhadap agama, ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri. Ketika pengaruh gereja di Eropa menindas para ilmuwan akibat penemuan mereka yang dianggap bertentangan dengan kitab suci, para ilmuwan pada akhirnya menjauh dari agama bahkan meninggalkannya. Persoalan yang menjadi topic pembicaraan kita mau tak mau harus muncul, ”Apakah agama masih relevan dengan kehidupan masa kini yang cerminannya seperti digambarkan diatas?’. Sebelum menjawab, perlu terlebih dahulu dijawab:”Apakah manusia dapat melepaskan diri dari agama?” Atau, “Adakah alternatif lain yang dapat menggantikannya?” Dalam pandangan Islam, keberagaman adalah *fitrah* (sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya)

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

*(Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu Ar-Rum: 30))*

William James menegaskan bahwa, “Selama manusia masih memiliki naluri cemas dan mengharap, selama itu pula ia beragama (berhubungan dengan Tuhan).” Itulah sebabnya mengapa perasaan takut merupakan salah satu dorongan yang terbesar untuk beragama). Ilmu hiasan lahir, dan agama hiasan batin. Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan, dan agama memberi harapan dan dorongan bagi jiwa. Ilmu menjawab pertanyaan yang dimulai dengan “bagaimana”, dan agama menjawab yang dimulai dengan”mengapa”. Ilmu tidak jarang mengeruhkan pikiran pemilikinya, sedang agama selalu menenangkan jiwa pemeluknya yang tulus (Shihab, Q., 1996).

Agama turun atas kehendak Tuhan, tetapi memahami dan berupaya merealisasikan agama terserah pada kita. Pada titik inilah ilmu agama lahir, selanjutnya adalah urusan manusia dan bergantung pada pengetahuan manusia. Agama tidak bimbang dalam berbicara tentang tujuannya dan menjelaskan kebaikan dan keburukan, tetapi kecacatan itu dijumpai dalam pemahaman manusia tentang maksud agama. Agama tidak butuh perbaikan dan penyempurnaan, akan tetapi, ilmu agama, yang bersifat manusiawi dan tidak sempurna secara terus menerus perlu diperbaiki. Agama bersih dari kultur dan buah pikiran manusia, tetapi ilmu agama, tanpa ragu sedikitpun, terpengaruh oleh hal hal demikian. Kaum revivalis bukan pembuat hukum (*Syr'i*) melainkan penafsir (*syarih*). Agama tidak memiliki kecacatan dan kekurangan, kecacatan banyak ditemukan dalam tafsir (Soroush, 2002). Agama itu adalah petunjuk dari Tuhan rabbul'alamin agar menjadi pedoman hidup manusia untuk menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama di dunia maupun di akhirat, dan untuk menjadi tali kebangsaan, persatuan, dan persaudaraan lahir dan batin (Ki Bagus Hadikusumo, PP Muhammadiyah 2013). Pemikiran yang menuntut peran dan arti pentingnya agama untuk didahulukan dari

pada aspek ekonomi. “Peranan Agama dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia”, yaitu harus mendahulukan pembangunan manusia-manusia yang berakhlak sebelum masyarakat dan ekonomi (Prawiranegara, S. 2011).

Menurut Muhammadiyah, Agama Islam adalah “apa yang diturunkan oleh Allah dalam al-Qur’an dan apa yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad dalam Sunnah shahihah, yang terdiri dari perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk, untuk kebaikan (hidup) manusia di dunia dan akhirat”. (Kitab HPT, 1987). Islam dalam pandangan Muhammadiyah, bahwa Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata karena Allah, agama semua Nabi, agama yang sesuai dengan fitrah manusia, agama yang menjadi petunjuk bagi manusia, agama yang mengatur hubungan dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama, dan agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam satu-satunya agama yang diridhai Allah dan agama yang sempurna. Dengan beragama Islam maka setiap muslim memiliki dasar/landasan hidup tauhid kepada Allah, fungsi/peran dalam kehidupan berupa ibadah, menjalankan kekhalifahan, dan bertujuan untuk meraih ridha serta karunia Allah SWT. Islam yang mulia dan utama itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan di dunia apabila benar-benar diimani, dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya (orang Islam, umat Islam) secara total atau kaffah dan penuh ketundukan atau penyerahan diri. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka terbentuk manusia muslimin yang memiliki sifat-sifat utama: kepribadian muslim, kepribadian mukmin, kepribadian muhsin dalam arti berakhlak mulia, dan kepribadian muttaqin (PHIWM,2001).

Di dalam Al-Quran, Allah swt dengan sangat tegas menyatakan bahwa agama Islam itu merupakan satu-Satunya agama yang Haq di Sisi Allah.

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

*“Sesungguhnya agama yang haq disisi Allah hanyalah Islam.”*

(Ali Imran: 19)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٨٥

*“Barang siapa mengharap selain Islam, tidak akan diterima darinya, di akhirat nanti dia termasuk orang-orang merugi.”*

(Ali Imran: 85)

Agama Islam itu adalah Agama yang Sempurna.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

*“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, Aku telah sempurnakan nikmat-ku untuk kalian, dan Aku ridhai Islam menjadi agama kalian.”* (al-Maidah: 3)

### **2.3.1 Pandangan Agama Dalam Bidang Politik**

Berbicara baik buruk terkait perilaku manusia tidak akan lepas dari bicara soal etika atau moral. Persoalan dalam ilmu politik memiliki dimensi moral yang tidak bisa diabaikan oleh peneliti. Adalah benar bahwa kebanyakan persoalan mendasar yang dihadapi para penggagas pemikiran politik pada dasarnya adalah persoalan etik. Pemimpin politik tidak boleh bertindak untuk keuntungannya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua orang. Negara muncul karena ketidakcukupan individu untuk menyediakan kebutuhan bagi dirinya. Tujuan negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum. Plato terus menerus mempertanyakan “tujuan kita menegakkan negara bukanlah untuk ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebaikan buat semua (Schmandt, HJ.2005) .

Muhammadiyah memandang urusan politik sama halnya dengan urusan atau bidang kehidupan yang lain. Urusan politik ditegaskan dengan kalimat Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara meliputi penegasan sebagai berikut :

1. Warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik, melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlak Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Beberapa prinsip dalam berpolitik harus ditegakkan dengan sejujur-jujurnya dan sesungguhnya yaitu menunaikan amanat dan tidak boleh mengkhianati amanat, menegakkan keadilan, hukum, dan kebenaran, ketaatan kepada pemimpin sejauh sejalan dengan perintah Allah dan Rasul, mengemban risalah Islam, menunaikan amar ma'ruf, nahi munkar, dan mengajak orang untuk beriman kepada Allah<sup>88</sup>, mempedomani Al-Quran dan Sunnah, mementingkan kesatuan dan persaudaraan umat manusia, menghormati kebebasan orang lain<sup>91</sup>, menjauhi fitnah dan kerusakan, menghormati hak hidup orang lain, tidak berkhianat dan melakukan kezaliman<sup>94</sup>, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan<sup>96</sup>, bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama (konspirasi) dalam melakukan dosa dan permusuhan, memelihara hubungan baik antara pemimpin dan warga, memelihara keselamatan umum, hidup berdampingan dengan baik dan damai, tidak melakukan fasad dan kemunkaran, mementingkan ukhuwah Islamiyah, dan prinsip-prinsip lainnya yang maslahat, ihsan, dan islah.
3. Berpolitik dalam dan demi kepentingan umat dan bangsa sebagai wujud ibadah kepada Allah dan islah serta ihsan kepada sesama, dan jangan mengorbankan kepentingan yang lebih luas dan utama itu demi kepentingan diri sendiri dan kelompok yang sempit.

4. Para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (*uswah hasanah*) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, *fasad* (kerusakan), dan hanya mementingkan diri sendiri.
5. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya dengan fungsi amar ma'ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh.
6. Menggalang silaturahmi dan ukhuwah antar politisi dan kekuatan politik yang digerakkan oleh para politisi Muhammadiyah secara cerdas dan dewasa (PHIWM, 2000).

### **2.3.2 Indikator Pandangan Agama Dalam Bidang Politik**

Dalam penelitian ini yang dimaksud indikator pandangan agama dalam bidang politik adalah berupa sejumlah pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang agama Islam terkait aspek-aspek aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah serta hukum-hukum Islam yang diwajibkan dan dilarang yang dipahami dan ada pada diri setiap Pimpinan Muhammadiyah maupun yang menjadi karakter pada sosok Sri Purnomo sebagai calon kepala daerah yang dipilih.. Pengetahuan dan pemahaman yang mendasar terkait paham keislaman Muhammadiyah tentang politik yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman, keyakinan, dan ketaatan untuk menenempatkan agama Islam sebagai dasar berpolitik
2. Pemahaman, keyakinan, dan ketaatan pada prinsip bahwa rusaknya politik karena tidak didasarkan pada agama
3. Pemahaman, keyakinan, dan ketaatan melaksanakan Kewajiban memilih pimpinan hanya kepada yang Islam
4. Pemahaman, keyakinan, dan ketaatan untuk mengutamakan sosok atau figur yang memiliki kepribadian

dan sifat-sifat kenabian seperti *sidiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathonah*

5. Pemahaman, keyakinan, dan ketaatan dalam menilai serta menentukan kemampuan calon kepala daerah secara Islami
6. Ketepatan mengidentifikasi kekaderan dan keislaman calon bupati
7. Pemahaman, keyakinan, dan keakuratan dalam menilai serta menentukan bahwa ada penanaman dan pemeliharaan arus utama keagamaan dalam masyarakat.

Terkait tentang variable agama yang diurai dalam poin-poin tersebut di atas tersebar dalam Sembilan (9) pertanyaan yang menyinggung kompetensi dan komitmen setiap pihak individu responden dan keterkaitan dengan pihak Sri Purnomo sebagai kandidat kepala daerah yang diusung.

## **2.4 Informasi Politik**

Informasi yang memberikan gambaran tegas dan spesifik terkait beragam jenis aspek yang diperlukan dalam setiap penelitian untuk mengetahui dan memahami lebih dalam dan lebih akurat merupakan hal yang mutlak adanya. Menurut Tata Taufik (2012 : 217) informasi merupakan elemen dasar komunikasi dan salah satu dari empat fungsi komunikasi yang dikenal. Keempat fungsi tersebut, yaitu fungsi intruksi dan komando, fungsi mempengaruhi dan persuasif, fungsi integrasi dan fungsi informasi. Informasi berhubungan dengan pesan dikirim atau diterima dan berhubungan juga dengan makna yang diterima, ketika message (pesan) yang diterima tidak memberi makna baru, karena pesan tersebut tidak diketahui sebelumnya, orang akan mengatakan tidak ada informasi. Informasi juga berhubungan dengan muatan pesan yang dibawa, jika muatan pesan dibawa secara acak, atau pesan tersebut tidak ada atau tidak ada informasi yang diterima. Abdul Kadir (2002: 31); (McFadden, 1999) mendefinisikan

informasi sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا  
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Al-Hujurat 49:6).*

Informasi yang jelas, akurat, valid, terpercaya bisa menjadi modal yang menumbuhkan spirit untuk maju, berkemajuan, dan sukses besar. Sebaliknya apapun bentuk informasinya jika tidak benar maka berpeluang merugikan bahkan bisa berujung pada pemidanaan oleh pengadilan. Dalam konteks pilkada Sleman, informasi yang valid tentang tim sukses (timses) dengan segala tugas dan wewenang beserta data yang diperlukan menjadi sangat menentukan kalah-menangnya calon yang diusung.

#### **2.4.1 Ketersediaan Informasi Politik**

Sekecil apapun bentuk informasinya terkait pilkada Sleman harus mendapat perhatian bersama oleh seluruh anggota timses. Informasi politik tentang pilkada Sleman meliputi dan terkait unsur-unsur prinsip dakwah, system atau model perjuangan, kinerja anggota timses dan dinamikanya, kepentingan dakwah, penguatan peran kader dalam politik kekuasaan, sumber-sumber dan produk hukum Persyarikatan, agen informasi Persyarikatan, kepastian tersebarnya informasi kepada Pimpinan dan warga Persyarikatan, dan terjaminnya stabilitas yang prima dari anggota timses terkait komitmen mewujudkan dan kerja-kerjanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada kenyataannya.

Marketing politik didalam Pemilihan Kepala Daerah telah banyak digunakan sebagai strategi pemenangannya. Banyak dari strategi tersebut memiliki ke khasan tersendiri agar dapat diterima baik oleh masyarakat. Menurut Wringi (1997, h.651), ilmu marketing tentunya menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat baik dan tepat untuk diterapkan dalam proses dipilihnya seorang kandidat di tempat pemungutan suara (TPS). Terkait informasi dan data yang akurat. (Mahardika & Lomanis, 2006) mendefinisikan arti dari strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan. Maka mengembangkan suatu strategi membutuhkan paling tidak suatu pengetahuan yang menyeluruh, kritis dan objektif mengenai kekuatan penghalang perubahan dan sekaligus peta seluruh kekuatan yang ada, termasuk analisis dengan kejujuran kekuatan internal yang dimiliki dan suatu tata susunan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan tujuan yang ingin dicapai dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada, sehingga dapat didapat strategi yang baik, dalam hal ini tidak ditentukan oleh suatu kecerdasan individual, melainkan oleh hasil kerjasama, terutama untuk bisa memperoleh data yang akurat.

Ketersediaan informasi politik secara memadai bagi timses maupun Pimpinan Muhammadiyah adalah hal tersendiri yang tentu memerlukan kerja-kerja yang tidak gampang dan biaya yang tidak sedikit. Disisi lain informasi politik yang akurat itupun baru akan memiliki arti penting bagi timses untuk kemenangan dalam pilkada ketika informasi itu bisa sampai dan dipahami dengan baik oleh komunitas/warga calon pemilih. Informasi politik itu menjadi bagian dan barang sangat berharga yang tak terpisahkan dalam komunikasi politik.

#### **2.4.2 Indikator Ketersediaan Informasi Politik**

Dalam penelitian ini yang dimaksud indikator ketersediaan informasi politik adalah adanya sejumlah informasi penting dan mendasar serta memadai bagi anggota timses maupun warga yang

ditarget mejadi pendukung dan pemilih kadidat/calon bupati yang diusung. Keberadaan dan sejumlah informasi politik itu menyangkut dan bisa melekat pada diri timses, warga calon pemilih dan bahkan pihak masyarakat luas yang dalam batas-batas tertentu dimungkinkan setelah mendapat informasi karena diprediksi akan mejadi pendukung dan pemilih baru. Indikator ketersediaannya informasi politik ini terdapat dalam rumusan dalam sembilan yang aspek-aspeknya meliputi ha-hal sebagai berikut:

1. Pandangan tentang penting tidaknya dakwah di bidang politik
2. Pemahaman Strategi perjuangan politik antara melalui perorangan ataupun dilakukan secara organisatoris
3. Pemahaman dan kesadaran perlunya bergerak secara nyata di lapangan/ masyarakat
4. Perlu dan adanya bukti kesadaran berjuang bersama dan bersatu serta tidak keluar dari barisan perjuangan
5. Adanya kesepahaman bahwa berdakwah melalui politik kekuasaan itu sangat penting dan menentukan
6. Kesadaran dan komitmen serta semangat perlunya medorong Kader Muhammadiyah untuk menjadi terjun di dunia politik
7. Pengakuan dan kesadaran pentingnya komitmen berorganisasi dengan didasari pengetahuan terhadap prinsip-prinsip dan garis perjuangan organisasi
8. Adanya pemahaman dan kesadaran pentingnya kepemimpinan dan lembaga sebagai sumber informasi
9. Adanya keyakinan dan bukti yang memadai terkait tersebarnya informasi politik dengan baik di lingkungan Pimpinan dan warga Muhammadiyah.

## 2.5. Modal Sosial

Modal sosial secara sederhana didefinisikan sebagai kumpulan nilai-nilai atau norma-norma informal secara spontan yang terbagi di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka. Fukuyama mengemukakan bahwa mereka harus mengarah kepada kerjasama dalam kelompok dan berkaitan dengan kebajikan-kebajikan tradisional seperti: kejujuran; memegang komitmen; bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan norma saling timbal balik. Selanjutnya dijelaskan oleh Fukuyama bahwa dalam kondisi tertentu modal sosial dapat memfasilitasi tingginya derajat inovasi masyarakat dan daya adaptasi masyarakat (Fukuyama, 2000)

Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul '*The Rural School Community Centre*' (Hanifan, 1916). Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga yang membentuk suatu kelompok sosial.

Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hampir seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an. *Pierre Bourdieu*, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "*The Forms*

*of Capital*” (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Dalam setiap transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan. Modal sosial di dalam pendekatan atau model mobilisasi menjadi bagian atau unsur yang tak terpisahkan dari sejumlah unsur yang ada di dalam model mobilisasi. Model mobilisasi meneliti perilaku pemilih yang disebabkan oleh organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial. Model sosialisasi melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh sosialisasi oleh agen-agen seperti keluarga, teman pergaulan dan media.

### **2.5.1 Konsep Modal Sosial Dalam Politik**



**Gambar 2.1 Konsep Modal Sosial dalam Politik**

Bertolak dari pola pikir tersebut maka Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 2011).

Bain dan Hicks dikutip dalam (Krishna & Shrader, 2000) mengajukan dua dimensi modal sosial sebagai kerangka konseptual untuk mengembangkan alat pengukur tingkat keberadaan modal sosial. Dimensi *pertama* yang disebutnya dimensi kognitif, berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan keyakinan yang mempengaruhi kepercayaan, solidaritas dan resiprositas yang mendorong ke arah terciptanya kerjasama dalam masyarakat guna mencapai tujuan bersama. Setiap kelompok etnik sebenarnya memiliki dimensi kognitif – atau bisa juga disebut sebagai dimensi kultural - ini, sekalipun dalam kadar yang berbeda. Ada yang kaya dengan nilai-nilai budaya sebagai modal sosial yang memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis, baik sesama warga masyarakat secara internal maupun dengan orang-orang dari kelompok sukubangsa atau etnik yang berbeda. Sementara kelompok etnik tertentu lebih menekankan nilai-nilai solidaritas dan kerjasama dalam kelompok sendiri dan secara tradisional tidak memiliki pedoman untuk berinteraksi secara baik dengan kelompok lain.

Dimensi *kedua* modal sosial adalah dimensi struktural, yang berupa susunan, ruang lingkup organisasi dan lembaga-lembaga masyarakat pada tingkat lokal, yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat. Dimensi struktural ini sangat penting karena berbagai upaya pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan lebih berhasil bila dilakukan melalui kelembagaan sosial pada tingkat lokal. Dimensi struktural modal sosial yang secara umum adalah berupa jaringan hubungan dalam kelembagaan mendapat perhatian penting di dalam menelaah pentingnya modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Beberapa tulisan dan kajian seperti yang disajikan berikut ini menjelaskan hal tersebut (Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 5 No. 1 Tahun 2003 10). Model mobilisasi meneliti perilaku pemilih yang

disebabkan oleh organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial. Model sosialisasi melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh sosialisasi oleh agen-agen seperti keluarga, teman pergaulan dan media.

### **2.5.2 Indikator Modal Sosial Dalam Politik**

Dalam penelitian ini yang dimaksud modal sosial adalah kumpulan nilai-nilai atau norma-norma informal yang telah dipahami dan berada di dalam warga dan masyarakat. Kumpulan nilai atau norma itu diakui keberadaannya oleh Pimpinan dan warga Muhammadiyah bahkan simpatisan atau pihak di luar Muhammadiyah yang dimungkinkan menjadi pendukung timses. Bahkan sebelum adanya pilkada, system maupun Undang Undang pilkada, modal sosial Muhammadiyah itu sudah sangat diakui keberadaannya dan terus berkembang sejalan dengan dinamika Muhammadiyah itu sendiri. Keberadaan kumpulan nilai dan norma itu terstruktur dan diukur dengan sejumlah pertanyaan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Adanya komitmen dan rasa tanggung jawab para Pimpinan Muhammadiyah dalam melaksanakan apa yang menjadi kebijakan PDM Sleman terkait pilkada.
2. Adanya kesadaran pemahaman dan logika bahwa ikatan hukum yang berupa kewajiban yang dibangun oleh Muhammadiyah itu menjadi sarat dan mutlak bagi suatu perjuangan dan tanpa itu perjuangan tidak mungkin berhasil
3. Kesadaran untuk mengakui paham dan logika yang dibangun oleh Muhammadiyah menuntut adanya kesamaan pandangan dan harapan terkait apa yang diperjuangkan.
4. Pangakuan adanya kesamaan pandangan dan harapan terkait perjuangan dalam pilkada.

5. Pengakuan pentingnya informasi politik dan perlunya sosialisasi hingga informasi itu sampai dan diketahui dengan baik oleh warga Muhammadiyah khususnya.
6. Adanya data yang signifikan bahwa selain mendapatkan informasi, para warga Muhammadiyah juga benar-benar telah menggunakan informasi politik tersebut dalam pilkada.
7. Adanya pemahaman dan keyakinan bahwa kumpulan nilai dan norma-norma sosial Muhammadiyah itu bisa menjamin mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.
8. Norma agama dan hukum terbukti telah menjadi pegangan paling kuat bagi para Pimpinan dan Warga Muhammadiyah pada umumnya.
9. Secara khusus, norma agama dan hukum terutama pada bidang politik telah dipahami dan menjadi pegangan oleh para Pimpinan maupun warga Muhammadiyah.

## **2.6. Perilaku Memilih**

Perilaku memilih dalam ragam pandangan. Ramlan Surbakti (1999: 145-146) menyatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya:

- a. Pendekatan Struktural yang melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.
- b. Pendekatan Sosiologis yang cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin,

tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.

- c. Pendekatan Ekologis yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial.
- d. Pendekatan Psikologi Sosial berupa identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.
- e. Pendekatan Pilihan Rasional yang melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Secara umum, pemilahan pendekatan terkait perilaku memilih terbagi atas empat pendekatan yakni pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (The Columbia of Electoral Behavioral), pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (The Michigan Survey Research Center) dan pendekatan rasional serta pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing) (Nursal, 2004)

Pandangan yang lain menjelaskan bahwa identifikasi partai (party ID) telah menjadi faktor utama perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Pemilih tidak lagi dominan melihat faktor kedekatan (proximity), baik kedekatan etnis maupun daerah dalam menentukan pilihan suara, sebagaimana kesimpulan umum yang selama ini digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih dalam politik lokal di Indonesia. Artikel ini menegaskan bahwa pemilih cenderung mengindentikkan diri dengan partai, kemudian menentukan pilihan suaranya kepada kandidat yang diusung oleh partainya (Haryanto, 2014).

Perilaku memilih oleh orang perorang maupun kelompok bisa dinyatakan ada karena adanya partisipasi politik atau keikutsertaan dalam memilih. Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. (Surbakti, 1992) menyebutkan dua

variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya (Prabowo & Sardini, 2017).

Pemilahan yang lain terkait model pendekatan perilaku memilih juga ditegaskan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama bahwa Smets mengajukan pandangannya terkait enam model teori utama yaitu model teori tes sumber daya (*the resource model*), model sosialisasi (*the socialization model*), mobilisasi (*the mobilisation model*), model pilihan rasional (*the rational choice model*), model psikologis (*the psychological model*), and model lembaga politik (*the political–institutional model*) (Smets & Van Ham, 2013). Model sumberdaya meneliti variabel variabel yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi, suku bangsa, tempat tinggal, pendapatan dan lain sebagainya (Smets & Van Ham, 2013). Model mobilisasi meneliti perilaku pemilih yang disebabkan oleh organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial. Model sosialisasi melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh sosialisasi oleh agen agen seperti keluarga, teman pergaulan dan media. Model rasional melihat perilaku memilih dipengaruhi oleh pilihan masa lalu (past turnout) (Cutts et al., 2009), pemilih pemula ( new voter), kecenderungan untuk memilih (propensity to vote), biaya memilih (costs of voting), keperdulian pada calon (Cares who wins), keuntungan personal (personal benefits and civic duty), dan evaluasi pada kondisi ekonomi, parpol dan calon (Evaluation economy, parties and candidates) (Rosenstone, 1982).

### **2.6.1 Praktek Perilaku Memilih**

Dalam penelitian ini yang dimaksud praktek perilaku memilih adalah informasi terkait tindakan memilih yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada yang berlangsung pada tahun 2010 dan 2015 dengan beberapa faktor yang melatar belakangi dijatuhkannya pilihan terhadap kandidat atau calon kepala daerah yang diusung. Model pendekatan atau teori mobilisasi yang ditegaskan dan digunakan dalam penelitian ini mencoba mengaitkan variable organisasi, agama, informasi politik, dan modal sosial organisasi dengan perilaku memilih para Pimpinan Muhammadiyah Sleman. Praktek perilaku memilih itu terungkap dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pimpinan Muhammadiyah Sleman benar-benar telah menjatuhkan pilihannya kepada Sri Purnomo karena calon kepala daerah ini diakui dan dinyatakan sebagai anggota dan Pimpinan Muhammadiyah yang memahami tentang organisasi Muhammadiyah dan aktif dalam pergerakan perjuangan organisasi ini.
2. Bahwa Pimpinan Muhammadiyah Sleman benar-benar telah menjatuhkan pilihannya kepada Sri Purnomo karena calon kepala daerah ini diakui dan dinyatakan memiliki kecakapan atau kompetensi keagamaan/keislaman dalam kiprahnya di Muhammadiyah dan masyarakat Sleman.
3. Bahwa Pimpinan Muhammadiyah Sleman benar-benar telah menjatuhkan pilihannya kepada Sri Purnomo karena telah mendapatkan informasi politik yang memadai terkait pilkada Sleman baik tahun 2010 maupun 2015.
4. Bahwa Pimpinan Muhammadiyah Sleman benar-benar telah menjatuhkan pilihannya kepada Sri Purnomo karena diakui dan diyakininya adanya bukti modal sosial yang dimiliki

Muhammadiyah yang membuat semangat dan dorongan para pemilih Muhammadiyah.

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dari penelitian ini digunakan untuk meninjau penelitian ini dan memperkuat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Mengenai Perilaku Memilih di Jurnal Internasional**

Variabel	Penulis, Judul dan Tahun Terbit	Fokus Kajian	Temuan
Perilaku Memilih	R. Alan Walks, dengan judul : Electoral behaviour behind the gates: partisanship and political participation among Canadian gated community residents, 2010	Penelitian ini berfokus kepada perilaku pemilih serta partisipasi politiknya di kawasan kota yang pengamanannya baik di Kanada.	Penelitian ini menunjukkan bahwa warga masyarakat yang terjaga keamanannya akan bersandar pada hak dalam preferensi partai mereka dan / atau akan berpartisipasi lebih sedikit dalam proses politik. Ditemukan bahwa warga komunitas yang terjaga keamanannya memang lebih mungkin untuk mendukung partai Konservatif.

	Jack Vowlws, Hilde Coffe dan Jennifer Curtin, dengan Judul : Electoral Behaviour and Inequality, tahun 2017	Penelitian ini mengkaji tentang fenomena-fenomena ketimpangan sosial dan Pemilihan umum di Selandia baru pada tahun 2014 yang lalu	Saat ini di New Zeland tidak bisa mengabaikan masyarakat yang berada pada dimensi politik baru yang mungkin menyalurkan perilaku memilih dalam arah baru. Pengetahuan psikologi politik akan berpengaruh terhadap keterbatasan visi, dan cara cita-cita demokrasi dapat diselewengkan, oleh elit yang cerdas.
Modal Sosial	Gill Still, menulis dengan Judul : Gender and Political Behaviour in Japan, 2004	Penelitian ini berfokus tentang perilaku pemilih perempuan Jepang dan ketertarikan kepada politik selama 30 tahun terakhir	Penulisan menunjukkan bahwa beberapa perbedaan politik secara keseluruhan antara laki-laki dan perempuan lebih tipis dari yang diyakini sebelumnya. Beberapa perbedaan telah hilang dari waktu ke waktu, terlihat ketika perempuan sudah mulai aktif kembali dalam aktifitas politik selama ini di Jepang
	Horst Hartmann dengan judul Changing Political Behaviour in Kerela,	Penelitian ini berfokus kepada perilaku politik masyarakat Kerela pada pemilu 1967	Temuan dari penelitian ini adalah hasil pemilu 1967 di Kerala secara meyakinkan dipengaruhi oleh fakta bahwa pertimbangan sekuler telah menjadi penting dalam menentukan perilaku memilih pada saat itu.

Agama	Clive Bean and Ian McAllister, dengan judul Electoral Behaviour in the 2010 Australian Federal Election, 2010	Penelitian ini ingin melihat bagaimana perilaku pemilih pada Pemilihan umum Australia pada tahun 2010 yang lalu	Temuan yang dilakukan oleh penulis adalah masyarakat Australia lebih menggunakan pendekatan Psikologis yang mana mereka lebih mencari sosok pemimpin yang baik dan juga tidak terlepas dari pengaruh dari partai besar di parlemen Australia.
	Alak Bhattacharya, dengan judul Tribal Politics Of Tripura : A Study In Electoral Behaviour	Fokus dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan motif politik partisipasi masyarakat suku Tripura dalam politik elektoral sejak 1972 - 2003	Hasil dari penelitian ini adalah di India hampir mengabaikan sistem non-voting yang bisa digunakan. Jika perilaku pemilu harus diambil sebagai indikator keberhasilan demokrasi parlementer, maka keberadaan skala besar non-voting akan berarti bahwa Demokrasi Parlemen India benar-benar tidak berfungsi.

<p>Informasi Politik</p>	<p>Saeed Ahmad, Mudasar Mustafa, Ahsan Ullah, Muhammad Shoaib, Muhammad Mushtaq, Wasif Ali, (2017) "Role of types of electoral rigging, socioeconomic status, politics and voting behavior in the formation of attitudes toward electoral integrity"</p>	<p>Penelitian ini ingin melihat pengaruh positif hubungan diantara para legislative baik dalam pengembangan informasi, informasi publik dan juga socioeconomic yang dimilikinya.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya pengaruh hubungan antara legislative dan juga informasi yang didapatkan oleh masyarakat seperti pendidikan orangtua, usia, pendidikan, background keluarga. Hal tersebut sudah menjadi persepsi masyarakat bahwa akan mempengaruhi masyarakat.</p>
	<p>Amy Whitelock, Jeryl Whitelock, Jennifer van Heerde, (2010) "The influence of promotional activity and different electoral systems on voter turnout: A study of the UK and German Euro elections",</p>	<p>Dalam Penelitian ini membahas terkait dengan evaluasi dari pemilihan di Eropa dan UK. Penelitian ini juga melihat pengaruh dari promosi yang telah dilakukan untuk mensukseskan pemilihan yang dilakukan.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini juga menyaranakan adanya general link antara sistem pemilihan, kampanye partai dan para tim sukses untuk menyebarkan informasi kepada publik dan agar mendapatkan pengaruh positif dari adanya pemilihan.</p>

Sumber : data diolah penulis

## 2.7 Kerangka Teoritik

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana perilaku memilih Pimpinan Muhammadiyah dalam pilkada Sleman. Model pendekatan yang cocok untuk penelitian ini adalah model mobilisasi (*mobilization model*) yaitu model yang menempatkan organisasi, agama, informasi politik, modal sosial. Karena model ini menempatkan empat variable tersebut, maka variabel itu diprediksi menjadi variabel independen. Dengan empat variabel yang diprediksi sebagai variabel independen, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mengaitkan dan mengungkap variabel dependen yang berupa perilaku memilih yang dijalani oleh para Pimpinan Muhammadiyah Sleman dalam pilkada 2010 maupun 2015.

Beralih ke kelompok variabel berikutnya, mobilisasi model para pemilih berpusat di sekitar gagasan bahwa warga negara dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam politik oleh pihak-pihak, kandidat, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial baru (Rosenstone, 1982). Jaringan sosial semacam itu mengurangi biaya partisipasi politik dengan menyediakan pembentukan partai, kandidat, dan pemilihan umum, dll. Kehidupan asosiasi/organisasi, apalagi, menekankan nilai-nilai itu diperkirakan untuk memobilisasi warga. Bagian ini mencakup total dari 11 variabel mobilisasi. Ruh model mobilisasi yang awalnya digagas oleh Rosenstone dan Hansen menegaskan bahwa warga negara itu bisa dimobilisasi untuk kepentingan kandidat, kelompok kepentingan, dan gerakan sosial baru. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial –lebih tepatnya, Pimpinan Muhammadiyah Sleman – adalah pihak yang berkepentingan untuk sukses kandidat kepala daerah dan dakwah, telah melakukan mobilisasi pimpinannya, warganya, dan simpatisannya yang tidak kalah seriusnya dengan partai politik yang ikut berlaga dalam pilkada waktu itu. Secara lebih jelas berikut ini dibantu penjelasan tentang

hasil olahan model pendekatan untuk melihat bagaimana dan dimana posisi dan peran masing-masing variabel itu.

Tiga variabel independen meliputi organisasi, agama, informasi politik. Variabel organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah organisasi Muhammadiyah yang menjadi naungan dan tempat atau wadah perjuangan warga Muhammadiyah termasuk Sri Purnomo untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkemajuan. Variabel agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah agama Islam yang menjadi keyakinan warga Muhammadiyah dan diyakini dapat mewujudkan dan memelihara kehidupan yang bahagia duniawi hingga akhirat. Variabel informasi politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi seputar pilkada yang menyangkut pilkada, calon-calon kepala daerah dan tahapan – tahapan terkait pelaksanaan pilkada khususnya yang diterima oleh para Pimpinan Muhammadiyah.

Dua variabel berikutnya adalah berupa variabel antara (Z) yakni variabel modal sosial dan variabel lain yang benar-benar variabel dependen adalah variabel perilaku memilih. Yang dimaksud variabel antara atau (Z) dalam penelitian ini adalah variabel modal sosial. Variabel modal sosial itu sesungguhnya norma-norma yang dimiliki berupa norma-norma agama Islam (lebih tepatnya Al-Islam dan Kemuhammadiyah) dan hukum positif. Setelah variabel antara (Z) maka posisi berikutnya adalah variabel dependen yakni variabel perilaku memilih. Yang dimaksud perilaku memilih dalam penelitian ini adalah perilaku memilih yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah pada saat pilkada Sleman yang dipengaruhi oleh variabel independen tersebut di atas.

### **2.7.1 Hubungan antara faktor organisasi dan perilaku memilih dalam pilkada**

Hubungan antara faktor organisasi dan perilaku memilih dalam beberapa pandangan. Pembahasan mengenai perilaku memilih akan bersentuhan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat dari berbagai aspek. Pada dasarnya perilaku memilih bisa timbul dari isu yang berkembang selama roda pemerintah berjalan serta kebijakan politik yang menjadi faktor seseorang memiliki pilihan politik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada tiga pendekatan untuk melihat perilaku pemilih kedalam beberapa pendekatan, yaitu diantaranya pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), pendekatan psikologis (Mazhab Michigan) dan terakhir pendekatan Rasional (Nursal, 2004).

Muhammadiyah tidak akan terpisah atau dipisahkan dengan politik, karena bagaimanapun politik adalah hulu dari segala kebijakan, hanya saja kegiatan politik muhammadiyah adalah politik yang bermartabat dan tidak akan mengorbankan nilai-nilai kepatutan dan keIslaman. Secara realitas politik, peran dan kiprah Muhammadiyah dalam proses politik bangsa Indonesia tidak diragukan lagi. Meskipun Muhammadiyah menegaskan dirinya mampu menjaga jarak dengan partai politik, Muhammadiyah mampu melakukan upaya-upaya konseptual dalam rangka mengawal reformasi dan tidak terlihat adanya usaha untuk membawa masuk Muhammadiyah ke dalam kooptasi partai politik. Adapun para elitnya dan warganya memasuki partai dan mendirikan partai merupakan hak pribadi yang tidak terkait dengan organisasi. Bahasa Muhammadiyah dalam menitipkan agenda keummatan juga dilakukan dalam pemilihan-pemilihan kepala daerah atau legislatif. Kendati tidak secara formal tetapi dapat dilihat ketika menjelang Pemilu 2004, di pertemuan-pertemuan warga Muhammadiyah selalu dikenalkan tokoh yang akan mencalonkan diri menjadi anggota DPD-RI. Kondisi serupa terjadi pula menjelang tahun 2009 atau pemilihan kepala daerah, di

mana ada warga Muhammadiyah yang akan bertarung pada pilkada. Bahkan kita lihat juga bagaimana pada Pemilu 2014 Muhammadiyah ikut-ikutan mendirikan Relawan Matahari Bangsa dan Surya Madani Indonesia yang saling mendukung dua kubu yang saling berebut kuasa. Di tingkat desa, konsolidasi-konsolidasi serupa tentu lebih massif lagi, terkadang terjadi di pertemuan tingkat ranting (Jauhari, 2016).

Adanya dukungan tokoh agama menjadi pertimbangan tersendiri bagi pertimbangan pilihan politik pemilih. Sehingga strategi kampanye yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan seperti istighosah, yasinan, dan pengajian baik yang dilakukan di masjid-masjid maupun di berbagai pondok pesantren yang ada di kecamatan Lamongan masih menjadi salah satu media yang digunakan kandidat untuk menggalang dukungan NU di kecamatan Lamongan. Diantaranya yakni KH. Ilyas Mawardi, Ny. HJ. Khoiriyah Mastur, KH. Su'udi Karim, KH. Abdul Aziz Khoiri, KH. Add. Rouf. M. Ag, KH. Yazid Ihsan, S.Pdi, KH. Drs. Abd. Wahib, MM, KH. Abdul Jalil, KH. Ahmad Suyuti, M.Ag.M.Si, KH. Drs. Slamet Muhaimin. Kyai yang disebutkan di atas adalah Kyai yang berpengaruh di Kecamatan Lamongan sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat di kecamatan Lamongan. Memasuki babak baru perpolitikan nasional, NU mengalami pergeseran orientasi dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Pergeseran itu terjadi dari peran politik NU yang independent dan oposan menjadi partisan, dari peran politik kerakyatan menjadi politik kekuasaan, dari wacana institusional menjadi wacana personal, dari peran-peran politik yang berorientasi jangka panjang ke peran jangka pendek.

Ketua Lakpesdam, Ulil Absar-Abdalla mengatakan bahwa “ Bila dilihat dari sudut pandang orang dalam NU sendiri, sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan pada pola gerakan itu. Di

dalam NU sendiri terdapat tiga lapisan yang begitu kuat dan mengakar. Pertama, lapisan elite yang lebih concern pada politik. Mereka itulah yang saat ini berada di PKB. Kedua, ada lapisan Kyai yang saya kira tidak berubah karakternya, mereka adalah para Kyai yang tidak deal dengan politik, tapi juga tidak anti politik. Yang penting bagi mereka adalah organisasi NU tidak mendapatkan gangguan dan terancam dari oleh kekuasaan dan politik. Ketiga, lapisan anak-anak muda NU yang masih berfikir jernih dan mencoba mengembangkan pikiran-pikiran Abdurrahman Wahid dalam pemberdayaan masyarakat, mereka cukup menjaga jarak dengan politik. (-untuk menjelaskan tipe masyarakat NU yang ada sekarang ini di kecamatan lamongan yang kurang memperhatikan hati nuraninya tetapi hanya maalah duniawi) (Abdullah, 2002).

### **2.7.2 Hubungan antara faktor agama dan perilaku memilih dalam pilkada**

Dengan diperbolehkannya anggota SI untuk melaksanakan aktifitas politik, anggota SI sah-sah saja mengikuti kampanye untuk salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017. Kecuali untuk anggota SI yang mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan untuk berkampanye atau terlihat mendukung salah satu calon dalam pemilu. Terlepas dari anggota SI yang mengabdikan sebagai ASN, hampir seluruh warga SI berperan aktif dalam masa kampanye di masing-masing pasangan calon. Aktif berkampanye bukan berarti harus terdaftar sebagai anggota timses pasangan calon, namun mendukung sebagai simpatisan. Dukungan anggota SI secara individu menyebar dalam ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukkan keberagaman SI yang tidak hanya terhubung secara ideologi dengan salah satu calon tertentu saja. Karena prinsip ajaran SI yang digagas Tjokroaminoto dapat

diterapkan dalam banyak bentuk ideologi. Anggota Syarikat Islam (SI) Banjarnegara tercatat mengisi nama-nama timses yang terbagi menjadi 3 kubu sesuai dengan pasangan calon sebanyak 3 pasangan. Sebagian besar anggota SI yang tergabung dalam timses resmi pasangan calon adalah anggota atau kader partai politik tertentu. Keberagaman anggota SI membuat peta dukungan warga SI hanya kepada salah satu pasangan calon, namun menyebar (Prabowo & Sardini, 2017).

Tokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Halmahera Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya dalam kampanye, himbuan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama. Dengan demikian, maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat (Aya, 2013).

Tidak diragukan bahwa tokoh agama bertindak dipengaruhi oleh keyakinan agamanya. Terlepas dari kelemahannya, Emile Durkheim (1858-1917) sebagai "ilmuan pertama" memperkenalkan konsep "fungsi sosial" dari "agama". Ide-idenya oleh para ahli sosiologi modern telah digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi sosial agama, yaitu: fungsi solidaritas sosial, memberi arti hidup, kontrol sosial, perubahan sosial dan dukungan psikologi. Agama menurutnya adalah sesuatu yang amat bersifat sosial. Artinya, bahwa dalam setiap kebudayaan, agama adalah bagian yang paling berharga dari seluruh kehidupan sosial. Pandangan Durkheim tentang agama terpusat pada klaimnya bahwa agama adalah "sesuatu yang amat

bersifat moral". Sumber agama adalah masyarakat itu sendiri yang akan menilai sesuatu itu bersifat *sacral* atau *profane*. Ritual-ritual keagamaan tidak lain merupakan "*suatu mekanisme primer*" untuk mengekspresikan dan menguatkan kembali sentimen dan solidaritas kelompok. Jadi seluruh pandangan Durkheim tentang agama terpusat pada klaimnya bahwa "*agama adalah sesuatu yang amat bersifat sosial*"( Susanto, H.,2005). Dalam konteks itulah Pimpinan Muhammadiyah Sleman sesungguhnya telah melakukan apa yang digambarkan oleh *Emile Durkheim* terkait fungsi sosial agama dan teori solidaritas.

Titik-titik rawan tentu harus diantisipasi agar bahaya laten konflik dan kekerasan dalam pilkada semaksimal mungkin dapat diantisipasi. Tanpa upaya tersebut tentu Pilkada akan menjadi medan konflik dan kekerasan politik baru yang terjadi di berbagai daerah. Sehingga berbagai upaya rekayasa sosial untuk melakukan resolusi konflik serta *peace keeping* dalam rangka untuk mendorong berlangsungnya Pilkada damai menemukan urgensinya. Agama tentu punya peran strategis dalam berpartisipasi dalam implementasi proyek untuk mendorong humanisasi kehidupan politik lokal pada setiap penyelenggaraan Pilkada. Misi suci setiap agama untuk menata kehidupan agar lebih baik, tentu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk mendorong pentas panggung politik Pilkada untuk dapat berjalan secara damai dan demokratis (Najib, 2005).

Terjadi perdebatan yang menyangkut posisi agama dalam konflik dan kekerasan politik. Di satu sisi ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa agama punya peran terhadap terjadinya berbagai konflik dan kekerasan politik. Di sisi lain ada yang berpendapat bahwa agama sebagai credo humanis dan realitas tak terduga sangat menentang terorisme, pembunuhan serta kekerasan politik, karena kesemua itu bukanlah atas nama agama. Tindakan semacam itu bukan atas nama Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan

Sikh, karena tindakan tersebut telah melanggar kesucian dan martabat agama. Dua pandangan tersebut dibangun atas dasar asumsi yang berbeda. Pandangan pertama menganggap agama sebagai kekuatan destruktif, atau hantu masa lalu yang absurd, sedangkan yang kedua menganggap agama sebagai kekuatan kreatif dan berkeadaban. Kedua pendapat tersebut gagal dalam memahami realitas agama yang sesungguhnya. Kelompok pertama telah gagal dalam menghargai sifatsifat manusiawi dari agama dan pedoman moral-nyayang menekankan perilaku tidak toleran terhadap kekerasan. Sementara kelompok kedua telah gagal dalam memahami ajaran agama yang otentik, yakni respon yang tulus terhadap yang suci, bertujuan untuk menaklukkan kehidupan manusia dihadapan hukum Tuhan (Najib, 2005).

Kehadiran Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara juga telah mencegah adanya money politic yang telah membudaya di tengah masyarakat Indonesia. Himbauan dan fatwa Kiai mengenai haramnya money politic diikuti masyarakat secara sadar. Walaupun tentunya masih ada orang-orang yang memanfaatkan momentum ini untuk menggeruk pundi-pundi calon Bupati dan Wakil Bupati. Kehadiran tokoh agama (Kiai) dalam politik juga semakin mengokohkan peran posisi ulama di tengah masyarakat. Kiai tidak lagi hanya mengurus masalah-masalah profan saja. Kiai kini mempunyai tugas dan tanggung jawab mendampingi dan mendidik masyarakat agar melek politik. Politik sekarang tidak hanya menjadi lahan garap tokoh-tokoh politik saja, melainkan menjadi hal yang biasa dan menjadi milik siapa saja yang mau dan peduli mengenai masa depan daerah termasuk di dalamnya adalah tokoh agama (Kiai) (Setiawan, Subiyakto, & Basuki, 2006).

Seperti kita ketahui bersama masyarakat Bolaang Mongondow Utara mayoritas masyarakatnya Bergama muslim dan hanya sebagian kecil yang Bergama non muslim. Namun dalam hal menjatuhkan

pilihannya masyarakat tersebut tidak terlalu melihat faktor agama. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Bolmut tahun 2013. Masyarakat yang menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Depri Pontoh-Suriansyah Korompot bukan hanya masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim saja, namun ada juga masyarakat yang beragama non muslim. Padahal saat itu ada kandidat lain yang beragama non muslim yaitu pasangan nomor urut 2 Hamka-Felix yang dalam hal ini Felix memiliki latar belakang agama kristen. Dan ada juga masyarakat yang memiliki latar belakang agama muslim menjatuhkan pilihannya kepada pasangan Hamka-Felix. Jadi pada Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2013, faktor agama tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku memilih masyarakat (Pontoh, 2014).

Agama memiliki tempat yang khusus dalam kehidupan manusia, dan akan mempengaruhi cara kehidupan para penganutnya. Corak pemikiran dan pemahaman keagamaan yang berkembang dalam diri seseorang atau komunitas keagamaan tertentu (aliran atau mazhab) akan memiliki andil pula terhadap pembentukan sikap dan perilaku para pengikutnya. Dalam batas-batas tertentu, perilaku politik seseorang atau suatu komunitas masyarakat, ternyata dapat pula dipengaruhi oleh corak dan pemahaman terhadap agamanya (Sudrajat, 2002).

### **2.7.3 Hubungan antara faktor informasi politik dan perilaku memilih dalam pilkada**

Saya menggunakan instrumen survei untuk mengidentifikasi pengaruh berbagai jenis informasi mengenai perilaku memilih dalam prakarsa reformasi asuransi yang kompleks pada tahun 1988. Saya menunjukkan bahwa responden yang memiliki tingkat pengetahuan faktual (atau ensiklopedis) yang relatif rendah tentang inisiatif

menggunakan pengetahuan mereka tentang asuransi - preferensi industri untuk meniru perilaku responden yang memiliki pengetahuan faktual yang relatif tinggi. Jika kita percaya bahwa para pemilih yang berpengetahuan luas membuat keputusan terbaik, maka fakta bahwa para pemilih yang relatif tidak tahu informasi dapat meniru mereka menunjukkan bahwa ketersediaan jenis isyarat informasi tertentu memungkinkan para pemilih untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas, efisien sambil mempengaruhi pemilihan umum. Sebagai penutup, saya percaya bahwa implikasi kebijakan dari analisis ini cukup jelas. Sementara para pakar mengusulkan bahwa kita mendidik publik tentang politik untuk mengurangi dampak dari suara yang tidak terinformasi pada respon lembaga pengambilan keputusan yang demokratis. Pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana orang beradaptasi dengan ketidakpastian mencirikan banyak keputusan penting mereka mengarahkan pada upaya ke dalam penyediaan "sinyal" yang dapat dipercaya dan diakses secara luas. Hal ini menjadi cara yang lebih efektif dan hemat biaya untuk memastikan responsif hasil pemilu untuk preferensi pemilih (Lupia, 1994).

Secara bersama-sama, hasil kami menunjukkan pentingnya lingkungan informasi dalam menentukan efektivitas pemilu sebagai mekanisme agregasi informasi. Jika pemilih tidak yakin tentang variabel keadaan satu dimensi, hasil voting strategis dalam agregasi informasi tidak efektif. Jika ada ketidakpastian tentang distribusi preferensi atau jika ketidakpastian berdimensi lebih tinggi, maka

mekanisme pemilihan tidak berfungsi dengan baik. Pentingnya dimensi ketidakpastian untuk kinerja pemilu menunjukkan bahwa penelitian masa depan harus fokus pada peristiwa yang mendahului prosedur pemilihan, kampanye, jajak pendapat, dll.-hal-hal semacam itu menentukan lingkungan informasi (Feddersen & Pesendorfer, 1997)

Terdapat hubungan yang signifikan antara iklan Politik dalam PemiluKada di Minahasa terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounelet kecamatan Kakas., dengan dihasilkannya Korelasi *Pearson Product Moment* sebesar 0,416, sehingga menyatakan bahwa terdapat tingkat hubungan yang cukup tinggi atau hubungan yang cukup kuat : berdasarkan tabel interpretasi Nilai Korelasi dari Guilford dengan interval koefisien / kategori 0,401-0,599. Iklan politik dalam PemiluKada di Minahasa dapat memberikan sumbangan /kontribusi terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounelet kecamatan Kakas. Atau memiliki nilai koefisien determinan sebesar 17,30% dan sisanya 82,70% ditentukan oleh variabel lain seperti faktor lingkungan tempat pemilih pemula bergaul, keluarga, tingkat pendidikan, nilai-nilai sosial yang dianutnya, dan lain sebagainya. Terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan politik PemiluKada di Minahasa terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounelet kecamatan Kakas dalam pengujian signifikansi dari analisis Regresi Linear Sederhana dengan hasil akhir atau 9,23 4,06 (Fenyapwain, 2013).

Media telah menjadi elemen komunikasi politik yang perannya melampaui partai politik dan warga (lihat *McNair, 2003*). Aktor-aktor politik harus menggunakan media untuk memastikan pesan-pesannya – baik berupa program-program politik, pernyataan sikap, maupun kampanye – sampai kepada publik. Pengaruh media jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh partai politik dalam menyampaikan pesan-pesannya. Konsekuensinya, akses terhadap media menjadi perhatian utama aktor-aktor politik yang saling bersaing. Angka masyarakat yang tidak memilih atau golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat. Informasi berpengaruh bagi orang perorang dalam menentukan pilihan. Ada lima faktor yang membuat orang tidak memilih mulai dengan faktor teknis dan pekerjaan merupakan faktor internal serta faktor eksternal yang terdiri dari administratif, sosialisasi dan politik. Kelima faktor ini berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput (*Arianto, 2011*)

#### **2.7.4 Hubungan antara faktor modal sosial dan perilaku memilih dalam pilkada.**

Modal sosial (*Bourdieu, 1986; Coleman, 1988*) menggambarkan kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses sumber daya yang tertanam dalam jejaring sosial mereka. Modal sosial dapat dikonversi ke bentuk-bentuk modal lain seperti bantuan (modal manusia) atau informasi baru (modal intelektual) (*Resnick, 2001*). Aspek balik adalah konstruksi kunci dalam banyak perawatan modal sosial, baik pada tingkat umum atau individu. Lin

(2001) mendefinisikan modal sosial sebagai "investasi dalam hubungan sosial dengan pengembalian yang diharapkan di pasar". Dalam kerangka ini, modal sosial diciptakan melalui interaksi sosial dan harapan sumber daya sosial di masa depan yang mereka hasilkan.

Modal sosial sering dipisahkan menjadi "menjembatani" dan "ikatan" (Putnam, 2000; Stallings, 2006); kategori ini menggambarkan sumber daya yang tertanam dalam berbagai jenis hubungan. Ikatan yang menghubungkan berbagai kelompok dalam suatu jaringan, dari hubungan "penghubung", membantu menyebarkan informasi baru di seluruh kelompok tersebut (Raider & Burt, 1996). Seperti yang dijelaskan di bawah ini, hubungan yang lebih lemah (seperti teman seorang teman) lebih mungkin untuk menjembatani hubungan dan dengan demikian memberikan akses pada informasi ovel (*Granovetter, 1983*) dan perspektif yang beragam (terkait dengan menjembatani modal sosial). Serikat kuat, di sisi lain tangan, dicirikan oleh beberapa interaksi berulang dan tingkat kepercayaan, dukungan, dan keintiman yang lebih tinggi; hubungan ini biasanya memberikan akses ke bentuk konversi modal yang lebih substantif terkait dengan ikatan modal sosial (misalnya, pinjaman keuangan). Jaringan Facebook mengandung ikatan kuat dan lemah (Bakshy, Rosenn, Marlow, & Adamic, 2012). Karena individu mengikat dan lebih sedikit saluran untuk berinteraksi dengan ikatan yang lebih lemah (Haythornthwaite, 2005) fokus dari penelitian ini adalah menjembatani modal sosial karena kita tertarik pada bagaimana

Facebook memungkinkan akses yang lebih besar ke sumber daya yang dipegang oleh kita, yang — tidak disukai — mungkin tidak tersedia melalui salurannya.

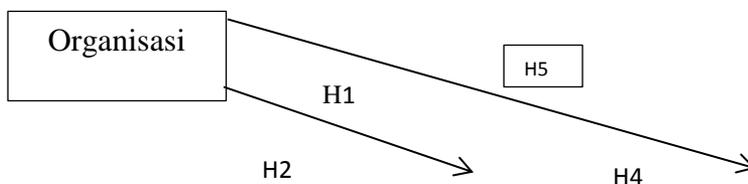
(Coleman, 1992) dan (Putnam, 1993) mendalilkan modal sosial sebagai bagian dari komunitas, sehingga komunitas-komunitas dengan stok modal sosial yang lebih sehat lebih mampu menghindari solusi koersif/pemaksaan untuk masalah kolektif dari pada mereka yang memiliki persediaan modal sosial yang lemah. Tetapi "komunitas" tidak bergabung dengan mendaftar di organisasi pertanian, orang tua dan petani. Manifestasi kolektif dari modal sosial harus berkelanjutan pada tingkat keterlibatan sipil individu dan dalam sikap individu terhadap orang lain. Makalah kami menunjukkan keberadaan modal sosial dalam bentuk hubungan timbal balik yang ketat antara keterlibatan sipil dan kepercayaan interpersonal. Dalam dan dari dirinya sendiri, identifikasi fenomena agregat pada tingkat individu merupakan kemajuan penting dalam bukti yang mendukung gagasan modal yang sangat sederhana (Chong & Druckman, 2007).

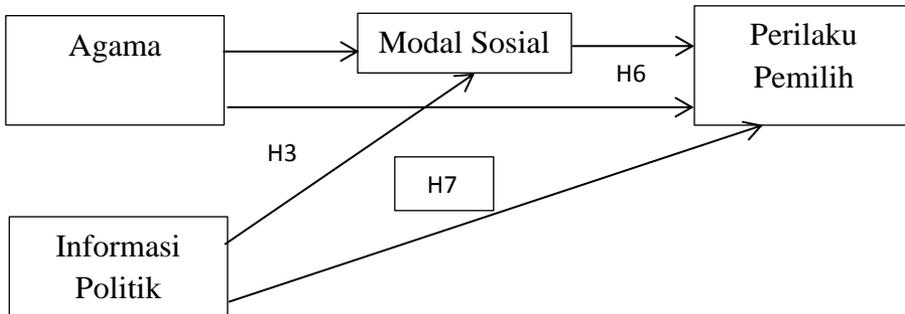
Dalam makalah ini, kami memperluas pengetahuan kami tentang implikasi modal sosial dari penggunaan situs jejaring sosial melalui identifikasi perilaku pemeliharaan hubungan yang spesifik yang meramalkan keuntungan modal sosial khusus dan Facebook yang spesifik. Kami percaya bahwa kemampuan sosial dan teknis Buku Face mempermudah individu untuk berinvestasi dan mengekstrak sumber daya sosial dari jaringan mereka dan untuk

mengakses Friends of Friends, yang mungkin memberikan sumber informasi baru. Yang paling penting, temuan ini menyoroti pentingnya mengelola secara aktif, merawat, dan memelihara jaringan seseorang, menunjukkan bahwa modal sosial tidak dihasilkan hanya dengan adanya koneksi di suatu *social networksites* (*sns*), namun dikembangkan melalui usaha kecil tetapi berarti pada bagian pengguna saat mereka terlibat dalam perilaku pemeliharaan hubungan seperti menanggapi pertanyaan, ucapan selamat atau bersimpati dengan orang lain, dan mencatat berlalunya hari yang bermakna. Pekerjaan ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang aktivitas pemeliharaan hubungan di jejaring sosial dan menunjukkan bahwa manfaat sosial yang sesungguhnya situs jaringan mungkin tidak hanya mempertaruhkan hubungan teknis yang mereka buat, tetapi dengan menciptakan lingkungan di mana pertukaran komunikatif yang bermakna, dan potensi manfaat modal sosial yang mereka wujudkan, dapat mengalir (Nicole B. Ellison, Jessica Vitak, Rebecca Gray, 2018).

## HIPOTESIS

Berdasarkan kerangka teori yang didapat, maka didapatkan hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:





**Gambar 2.2 - Model Penelitian**

- H1. Variabel organisasi memiliki pengaruh terhadap variabel modal sosial
- H2. Variabel agama memiliki pengaruh terhadap modal sosial
- H3. Variabel informasi politik memiliki pengaruh terhadap variabel modal sosial
- H4. Variabel modal sosial memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih
- H5. Variabel organisasi memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih
- H6. Variabel agama memiliki pengaruh terhadap perilaku memilih
- H7. Variabel informasi politik memiliki pengaruh terhadap variabel perilaku memilih